

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang menitik beratkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ke arah yang lebih baik (I.C. Kusuma, 2018)). Hal tersebut dapat di sadari melalui adanya perkembangan dalam pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM yang merupakan sebuah sektor yang berguna dalam memajukan perekonomian Indonesia dan dapat dianggap sebagai benteng pertahanan sekaligus ujung tombak dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Hal tersebut menjadikan UMKM sebagai salah satu pilihan dalam menyediakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan domestik bruto serta dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia.

UMKM merupakan salah satu entitas pelaku ekonomi yang usahanya sudah teruji saat Indonesia dilanda krisis ekonomi moneter pada tahun 1998. Hanya entitas pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tidak terpengaruh secara signifikan tentang adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia (Arda, 2021). Pada saat itu UMKM disebut sebagai solusi dalam mempertahankan serta ketahanan ekonomi suatu bangsa terutama bagi masyarakat kecil. UMKM juga memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan bagi negara dalam bentuk devisa. Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia akan tetapi UMKM masih mempunyai kelemahan saat beroperasi seperti keterbatasan permodalan dan rendahnya sikap

profesionalisme sumber daya manusia dalam melakukan tata kelola. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam mendukung perkembangan usaha UMKM. Seperti program pembinaan dalam bentuk manajemen usaha, tata kelola, dan permodalan. Tentunya hal tersebut dilakukan pemerintah karena, UMKM diharapkan dapat memainkan sebuah tugas penting dalam menguatkan ekonomi bangsa maka dari itu diperlukan pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat yang dapat menciptakan pasar baru serta inovasi untuk UMKM agar dapat mencapai pasar secara *go internasional* (Fazira, 2018).

Fenomena yang sering terjadi pada pelaku UMKM di Kabupaten Jombang biasanya berkaitan dengan sulitnya memperoleh tambahan modal pada usaha. Kendala modal dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya suatu usaha dalam mencapai suatu keberhasilan. Hal ini membuat pelaku UMKM di Kabupaten Jombang saat melakukan usaha, justru menggunakan modal usaha sendiri dan tidak memisahkan antara dana pribadi dengan dana yang digunakan untuk usaha. Sedangkan, untuk menjalankan suatu usaha diperlukan kecukupan dana agar usaha berjalan dengan lancar, dan diperlukan adanya pemisah antara dana pribadi dengan dana perusahaan. Dalam menjalankan sebuah usaha yang diperlukan bukan hanya menggunakan modal pribadi saja tetapi perlu menggunakan dana yang berasal dari pinjaman pihak ketiga seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meskipun program Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan pemerintah pada bidang permodalan yang bisa didapatkan pada beberapa bank tertentu. Namun masih ada UMKM yang tidak menggunakan modal pemberian

kredit. Dikarenakan Umur usaha UMKM masih dianggap (1-3 tahun). Alasan lainnya yaitu karena sulitnya persyaratan yang diberikan oleh pihak pemberi kredit (Nurdwijayanti, 2018). Salah satunya yaitu laporan keuangan UMKM yang dapat mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Akan tetapi banyak UMKM yang belum menyediakan laporan keuangan pada usahanya. Hal ini terjadi karena pelaku UMKM sulit untuk membuat laporan keuangan. Akibat rendahnya tingkat pendidikan formal yang ditempuh pelaku UMKM tentunya juga akan berdampak pada tingkat implementasi laporan keuangan dengan berbasis SAK-EMKM (Nurhidayanti, 2019)

Laporan keuangan merupakan alat yang penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan (Nurdwijayanti, 2018). Mayoritas UMKM hanya mencatat jumlah yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan yang dijual. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akuntansi ataupun tidak memiliki tenaga ahli yang dapat melakukan pembukuan sesuai standar (Nurhidayanti, 2019).

Dewan standar akuntansi keuangan ikatan akutan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Exposure Draft Standar Akuntansi keuangan Entitas Mikro, Kecil dan menengah (ED SAK EMKM) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016 yang selanjutnya disebut SAK EMKM pada 24 Oktober 2016 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018 (Kudadiri, 2020). Dengan adanya SAK EMKM yang diterbitkan oleh IAI pelaku UMKM dapat dengan mudah menyusun dan menyajikan laporan keuangan (Nurhidayanti, 2019). Namun masih banyak

pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK EMKM. Hal ini terjadi karena pelaku UMKM merasa kesulitan dalam melakukan pembukuan sesuai SAK EMKM.

Kesulitan tersebut disebabkan oleh adanya faktor pertama tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku UMKM merasa tidak perlu melakukan pembukuan sesuai SAK EMKM, kedua banyak juga UMKM yang beranggapan bahwa penerapan SAK EMKM memerlukan teknologi informasi sehingga memerlukan biaya tambahan untuk melakukannya, ketiga mayoritas UMKM hanya membuat pencatatan tentang jumlah biaya yang dikeluarkan dan jumlah dana yang diterima serta hanya mencatat masuk keluarnya jumlah utang atau piutang (Nurhidayanti, 2019). Hal ini disebabkan karena masih rendahnya persepsi kemudahan pelaku UMKM dalam bidang akuntansi. Ke empat umur usaha UMKM yang menggap bahwa umur usaha yang masih dianggap baru sekitar 1-3 tahun tidak perlu melakukan pembukuan laporan keuangan.

Beberapa Penelitian yang dilakukan oleh (Adino, 2018) menyatakan bahwa skala usaha yang besar mempunyai sumber daya yang lebih besar dan mampu memperkerjakan karyawan dengan keahlian yang lebih baik, sehingga dapat berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. penelitian yang dilakukan (Nurhidayanti, 2019) Umur usaha tidak memiliki pengaruh terhadap implementasi SAK EMKM, hal ini dikarenakan tidak sedikit usaha yang baru mau mempelajari tentang pengelolaan keuangan. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Jabat, 2022) menyatakan bahwa umur usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan berbasis SAK

EMKM. Penelitian (Abidin, 2022) membuktikan bahwa Latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Implementasi SAK EMKM pada UMKM dibidang kuliner Kota Makassar. Ukuran usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM dibidang kuliner Kota Makassar. Umur Usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM dibidang kuliner Kota Makassar dan Informasi dan Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM dibidang kuliner Kota Makassar

Penelitian terdahulu memberikan hasil penelitian yang tidak konsisten. Dalam hal ini adalah hasil yang tidak selalu sama sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali. Maka, Peneliti melakukan penelitian dengan Judul “ Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemahaman Teknologi Informasi, Umur Usaha, Persepsi Kemudahan Terhadap Implementasi Sak Emkm Pada Studi Kasus Umkm Di Kabupaten Jombang”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan kajian penelitian ini

1.2.1 Apakah Latar Belakang pendidikan pelaku UMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Jombang.

1.2.2 Apakah Pemahaman Teknologi Informasi Pelaku UMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Jombang.

1.2.3 Apakah Umur Usaha UMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Jombang.

1.2.4 Apakah Persepsi Kemudahan pelaku UMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Jombang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan pelaku UMKM terhadap implementasi SAK EMKM pada umkm di Kabupaten Jombang.

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh pemahaman Teknologi informasi terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Jombang.

1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh umur usaha terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Jombang

1.3.4 Untuk mengetahui pengaruh dari persepsi kemudahan pelaku UMKM terhadap implementasi SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian.

1.4.1 Manfaat Teoritis.

1. Peneliti ini diharapkan memberikan manfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan ilmu pengetahuan khususnya tentang pengaruh latar belakang pendidikan,

pemahaman teknologi informasi, umur usaha dan persepsi kemudahan terhadap implementasi SAK EMKM

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya

1.4.2 Manfaat Praktis.

Secara Praktis Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan evaluasi bagi pemerintah khususnya wilayah Kabupaten Jombang tentang pentingnya implementasi SAK EMKM pada UMKM

2. Manfaat bagi UMKM.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pengetahuan bagi UMKM khususnya mengenai penerapan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan serta dapat menginspirasi penerapan SAK EMKM untuk meningkatkan kinerja keuangan

1.4 Waktu Penelitian.

Pelaksanaan Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu enam bulan, mulai bulan februari 2022 sampai bulan Agustus 2022. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Waktu Penelitian

No.	Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan 2022					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1	Pengajuan Judul	■					
2	Penyusunan proposal		■	■			
3	Penyebaran Kuisisioner				■	■	
4	Analisis dan Pengolahan data				■	■	
5	Penyusunan Laporan					■	■

Sumber : Data Primer 2022.